

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Bayu Media. Malang.
- _____. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung.
- Fadjar, Mukti. 2002. *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2003. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*. Akademik Pressindo. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Cetakan Ketiga. Banyumedia Publishing.
- Junaidi, Soewartojo. 2005. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Restu Agung. Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2002. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.CitraAditya Bakti. Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif. Teoritis dan Praktik*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Penaku. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- _____, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- _____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

_____, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

Sumber Lainnya/ Jurnal

AN, Dodik Prihatin. *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/839?dt=list.d
diakses pada tanggal 7 September 2017.

Manalu, River Yohanes. *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Karni, Soejono. 17 April 2010. *Perkembangan Korupsi Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.*
<http://soejonokarni.wordpress.com/2010/04/17/perkembangan-korupsi-dan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 17 September 2014.

Pandhanarum, Sandya Pawestri. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)*.
[.http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/167/160](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/167/160).diakses pada tanggal 7 September 2017.

Rampengan, Margareth Carla. *Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1575/1267>.diakses pada tanggal 7 September 2017.

Sari, Dewi Novita. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual*.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/2439/1976>.diakses pada tanggal 7 September 2017.

Setyawati, Ida Ayu. *Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara MoneyLaundering Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi*.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/375/369>.diakses pada tanggal 7 September 2017.

Supriatin, Dwi. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikelC502D98F5E50AF28A0E379B88CD4A11F.pdf>.diakses pada tanggal 7 September 2017.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. *The Global Programme
Against Corruption Un Anti-Corruption
Toolkit*. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020658.pdf>. diakses pada tanggal 9 Februari 2018.